



menghasilkan konflik yang dewasa ini dikenal sebagai "ketidak stabilan politik". Ketidak stabilan politik ini ditandai dengan jatuh banggunya pemerintahan berdasarkan dukungan partai, itupun diselingi oleh 45 proses melalui demonstrasi, 85 huru-hara dan 615 ribu kematian akibat kekerasan politik yang terjadi pada tahun 1948-1967.

Orde baru bagi pemerintahan Soeharto dilahirkan sebagai reaksi total sekaligus "koreksi total" atas segala bentuk penyelewengan orde lama. Orde baru dilahirkan dengan tekad untuk menata diri agar Bangsa Indonesia mampu membangun seperti yang dicita-citakan sejak merdeka. Kenyataan ini berarti bahwa orde baru dianggap sebagai era yang sama sekali "Baru", yang bebas dari persaingan ideologi orde lama. (Syamsuddin Haris, 1991, 6).

Pada tanggal 5 Januari 1973 terbentuklah "Partai Persatuan Pembangunan" yang merupakan fusi dari empat partai Islam yang sebelumnya (NU, PARMUSI, PSII, PERTI). Sebenarnya bagi masing-masing partai tidak begitu bergairah untuk bergabung, tapi karena tidak ada jalan lain akhirnya fusi diterima. Bagi pemerintah sendiri, seperti yang termuat dalam UU No 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya dijelaskan bahwa dengan adanya tiga organisasi kekuatan sosial politik

tersebut, diharapkan agar partai politik dan golongan karya benar-benar dapat menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, stabilitas nasional serta terlaksananya percepatan pembangunan. (UU RI NO 3 tahun 1975, hal, 80).

Tekad berfusi yang tak mungkin dihindari itupun bulat disepakati bersama. Kelompok Persatuan Pembangunan yang berbentuk konfederasi terus saling mengadakan pendekatan secara intensif dalam rangka mendahului realisasi pemerintah untuk berfusi menjadi partai politik dan Golkar yang memaksanya. Berbagai pertemuan dilangsungkan, sebagai langkah untuk menjembatani lahirnya partai baru. Pada tanggal 5 Januari 1973, merupakan hari bersejarah bagi PPP. Keempat partai yang berkonfederasi kedalam kelompok Persatuan Pembangunan, dalam rapat presidium Badan Pekerja dan pimpinan fraksi telah seia sekata untuk menfusikan diri kedalam satu partai politik.

Nama partai tidak menjadi masalah serius, meski sebelumnya ada usulan macam-macam, seperti Partai Persatuan Islam Indonesia, Partai Persatuan Muslimin Indonesia, Partai Perserikatan Islam Indonesia dan Partai Islam Indonesia. (Umaidi Radi MA, 1984, 78).

Nama partai akhirnya disepakati dari nama kelompok

konfederasi. Jadilah partai hasil fusi itu bernama Partai Persatuan Pembangunan. Fusi bersama itu diwujudkan dalam deklarasi yang ditanda tangani oleh pimpinan masing-masing unsur sebagai berikut: K.H. Idham Chalid (NU), H.MS. Mintaredja (MI), H. Anwar Cokrominoto (SI), H.Rusli Halil (Perti), dan K.H. Masykur (NU).

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa ada 3 motif mengapa deklarasi itu dicetuskan pada tanggal 5 Januari 1973:

- 1) Karena kelompok demokrasi pembangunan sudah bermusyawarah dan sudah memastikan dirinya bahwa mereka akan segera mengumumkan penggabungan mereka dalam satu program fusi pada tanggal 10 Januari 1973, sehingga secara politis dengan deklarasi itu Partai Persatuan Pembangunan tidak ketinggalan dari kelompok Demokrasi Indonesia dalam memberikan respon positif terhadap himbauan pemerintah.
- 2) Semangat persatuan di kalangan Partai Islam (terutama di kalangan pucuk pimpinan) begitu menonjol sebagai akibat goncangan psikologis akibat kekalahan dalam pemilihan umum.
- 3) Sesudah pemilihan umum 1971, isu penyederhanaan jumlah partai semakin berkembang. Dimulai dengan anjuran pemerintah untuk mengadakan pengelompokan di

DFR dan persiapan pemerintah untuk segera mengajukan rancangan undang-undang kepartaian pada DPRRI (Umaidi Radi MA, 1984, 85).

## 2. SEJARAH BERDIRINYA GOLKAR

Pengorganisasian Golongan Karya secara teratur dimulai sejak tahun 1960 dengan dipelopori ABRI khususnya TNI AD, dan secara eksplisit organisasi Golongan Karya lahir pada tanggal 20 Oktober 1964 dengan nama sekertariat Bersama Golongan Karya (sekber Golkar), dengan tujuan semula untuk mengimbangi dominasi ekspansi kekuasaan politik PKI, serta untuk menjaga keutuhan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.

Wadah baru ini menghimpun hampir 300 buah organisasi fungsional non politik yang berorientasi kepada karya dan kekaryaan, yang dulunya tidak berorientasi kepada politik dengan tiga organisasi sebagai tulang punggungnya yakni SOKSI, MKGR, dan KOSGORO. (M. Rusli Karim, 1993, 160).

Jadi semula Golkar merupakan organisasi yang dipakai untuk mengimbangi kekuatan ekspansi politik PKI di tahun 1960-an yang kemudian terus berkembang hingga saat ini, dimana fungsi Golkar yang tadinya Golkar dan ABRI menyatu karena Golkar dipimpin ABRI aktif, makin

lama Golkar sudah makin mandiri, dalam arti sudah tidak mungkin lagi bersangkutan paut dengan ABRI aktif.

Pada tahun 1965 satu tahun sesudah Sekber Golkar lahir sangat di luar dugaan momentum politik saat itu telah mendorong menjadikan sekber Golkar sebagai wadah alternatif atau pengimbang kekuatan fron nasional. Menyusul kegagalan pemberontakan G.30S/PKI, Sekber Golkar bersama kekuatan pancasila lain bersatu merapatkan barisan untuk mencanangkan upaya-upaya pembangunan diberbagai sektor kehidupan berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Pada awalnya anggota dari golongan karya disebut sebagai masyarakat kekarya, yang terdiri dari golongan fungsional. Dewan nasional mendefinisikan golongan fungsional adalah alat demokrasi berupa golongan warga negara Indonesia menurut tugas pekerjaannya dalam lapangan produksi dan jasa dalam melaksanakan pembangunan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang dicetuskan dalam bentuk proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Menurut dewan nasional, jumlah golongan fungsional dalam masyarakat Indonesia adalah:

- a) Angkatan Buruh/Pegawai.
- b) Angkatan Tani, Nelayan.

- c) Angkatan pengusaha Nasional
- d) Angkatan Bersenjata: 1) Darat, 2) Laut, 3) Udara 4) Kepolisian, 5) Veteran, 6) DPR dan OKD.
- e) Angkatan Alim Ulama: 1) Agama Islam, 2) Agama Kristen Protestan, 3) Agama Katholik, 4) Agama Hindu Budha.
- f) Angkatan Proklamasi.
- g) Angkatan Jasa: 1) Cendekiawan, 2) Guru dan Pendidik, 3) Seniman, 4) Wartawan, 5) Daerah-daerah 6) Pemuda, 7) Wanita, 8) Warga negara peranakan.

Sedang dalam Munas II Golongan Karya adalah serombongan orang dalam masyarakat Indonesia yang menyatukan diri dalam satu organisasi atas dasar persamaan kehendak untuk ikut serta memperjuangkan pembaharuan dan pembangunan sebagai pelaksanaan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 melalui pengabdian kekaryaan yang didasarkan atas jenis kerja atau lingkungan kerja, dengan menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur dan ketajaman rasio keseimbangan antara kehidupan rohaniah dan jasmaniah, (P.K. Poerwanto 1994, 83).

Dalam perkembangan lebih lanjut Golkar sebagai

kekuatan orde baru bertekad melaksanakan, mengamalkan dan melestarikan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, dengan melaksanakan pembangunan disegala bidang menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perkembangan Golkar dalam orde baru adalah sebagai kekuatan sosial politik yang merupakan aset bangsa yang selalu komit dengan cita-cita pembangunan nasional. Dalam rel politik orde baru, Golkar merupakan kekuatan sosial politik yang terbesar dengan lima kali menang dalam pemilihan umum (1971, 1977, 1982, 1987 dan 1992).

### 3. SEJARAH BERDIRINYA PDI

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dibentuk pada tanggal 10 Januari 1973. Pembentukan PDI sebagai hasil fusi dari lima partai politik yang berfaham nasionalisme, Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Kelima partai politik yang berfusi menjadi PDI adalah merupakan gabungan dari partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) Partai Murba, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

Seruan untuk berkelompok yang kemudian menjadi fusi pada mulanya mendapat tanggapan yang positif dari tokoh pimpinan partai yang mula-mula memberi dukungan adalah



Partai Nasional Indonesia (PNI), dan partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Namun usaha ini hampir mengalami kegagalan, ketika dua partai Katolik (Parkindo dan partai Katolik) menolak dikelompokkan dalam golongan spiritual karena perbedaan agama. Dua partai ini lebih suka bergabung dengan kelompok nasionalis dengan alasan di dalam kelompok terakhir ini dapat dilaksanakan program yang tidak mementingkan motif ideologi. Bahkan partai Katolik dalam hal ini mengatakan lebih baik membubarkan diri dari pada masuk ke kelompok spiritual. (pilihan artikel Prisma, 1991, 309).

Sejak dilaksanakannya fusi, dalam tubuh FDI selalu mengalami konflik intern, terutama dengan peristiwa yang menimbulkan konflik di kalangan elite pimpinan partai yang berasal dari unsur PNI. Akibatnya sejak pemilu dalam orde baru perolehan suara dalam FDI mengalami penurunan, kecuali dalam pemilu 1978 dan 1992 FDI mengalami kenaikan perolehan suara. Kenaikan jumlah suara FDI ini berkaitan dengan faktor-faktor yang lain baik intern maupun ekstern yang menguntungkan partai ini. Faktor-faktor yang lain baik intern maupun ekstern yang melatar belakangi keberhasilan FDI (dalam pemilu 1987 dan 1992) diantaranya jumlah yang berasal dari pendukung PNI yang "pulang kandang" dengan dimuncuil-

kannya sosok Bung Karno, dukungan generasi muda yang antusias, sikap ABRI yang lebih netral dan sikap media massa yang lebih bersimpati pada partai banteng serta isu-isu kampanye yang ditampilkan lebih segar seperti soal kabinet bayangan.

Dalam sejarah sebagai organisasi politik, PDI sering berhadapan dengan masalah pertentangan dikalangan pemimpinnya pada hakekatnya potensi konflik hanya salah satu masalah yang dihadapi PDI. Sejumlah masalah yang lain juga dihadapi PDI. Sejumlah masalah identitas partai (khususnya sejak pancasila ditetapkan sebagai asas tunggal), masalah kemandirian, demokrasi di tubuh partai, dan masalah rekrutasi. (P.K. Poerwantana 1994, 85).

## **B. PERJUANGAN ORSOSPOL (PPP, GOLKAR, PDI) DALAM KONSTELASI POLITIK DI INDONESIA.**

### **1. PERJUANGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILU**

Mengenai pemilihan umum, A. Sudiharto Djiwandono mengemukakan pendapatnya bahwa pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang penting. Ia merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Hal tersebut disebabkan oleh karena rakyat atau warga negara mempunyai hak untuk memilih dengan bebas wakil-

wakilnya yang akan ikut menyelenggarakan kegiatan pemerintah. Dengan melakukan pemilihan wakil-wakilnya secara bebas, maka berarti bahwa rakyat sudah ikut terlibat dalam kehidupan kenegaraan walaupun secara tidak langsung.

Pada saat sekarang ini memang tidak dimungkinkan rakyat terlibat langsung dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini disebabkan oleh karena semakin banyaknya jumlah penduduk suatu negara. Sehingga tidak mungkin untuk melibatkan mereka seluruhnya secara langsung dalam kehidupan kenegaraan.

Dapat kita nyatakan bahwa pemilu merupakan perwujudan yang nyata keikutsertaan rakyat atau warga negara dalam kehidupan kenegaraan. Semakin banyak rakyat yang ikut serta terlibat dalam kehidupan kenegaraan, dalam hal ini ikut melibatkan dirinya dalam kegiatan pemilu, maka berarti semakin tinggi tingkat kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya dibidang politik. Sebaliknya semakin sedikit rakyat yang ikut serta terlibat dalam kehidupan kenegaraan, dalam hal ini ikut melibatkan diri dalam kegiatan pemilu, maka berarti semakin rendah pula tingkat kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya dibidang politik. (Haryanto, 1984, 83). Dengan catatan keikutsertaan mereka dalam pemilu tidak

mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam negara Republik Indonesia, pemilu menempati posisi yang sangat tinggi. Karena pemilu merupakan bentuk yang nyata dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. Sedangkan demokrasi Pancasila merupakan hal yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

Kita memakai demokrasi Pancasila karena Pancasila merupakan tuntutan budi nurani manusia secara nasional mengingat Pancasila itu sendiri terdapat di dalam kehidupan setiap orang yaitu dimana setiap orang mengakui bahwa dirinya itu diciptakan oleh Tuhan. Ingin diperlakukan oleh siapa pun juga baik dalam tingkah laku sosial, ekonomi dan tingkah laku budaya dan tingkah laku politik secara manusiawi serta dijunjung tinggi derajatnya, merasa tidak dapat dipisahkan dari pada masyarakatnya baik masyarakat kecil (keluarga) masyarakat lingkungan hidupnya dan masyarakat nasional. Mengingat setiap orang Indonesia tidak diakui oleh negara lain sebagai warga negaranya ataupun sebagai bangsanya melainkan yang mengakui orang Indonesia itu sebagai warga negara Indonesia dan bangsa Indonesia

adalah negaranya sendiri dan bangsanya sendiri. Merasa adanya persamaan antara sesama rakyat Indonesia yang terdiri dari pada jiwa dan raga serta zat yang sama. Dengan adanya persamaan-persamaan itu tadi maka pada hakekatnya manusia itu tidak ada yang di dalam melaksanakan pekerjaan itu serba sendiri-sendiri ataupun selalu bersama-sama dan menghendaki adanya persetujuan dari pada yang lain.

Jadi di dalam diri manusia itu ada kehendak untuk bermusyawarah dan mufakat, serta merasakan pula di dalam dirinya itu untuk memperoleh kesejahteraan lahiriyah dan batiniyah yang penuh keadilan. Oleh karena itu pancasila ada pada diri manusia Indonesia yaitu pada tuntutan hati nuraninya. Dengan demikian pancasila tidak bisa dipisahkan dari manusia Indonesia. (Sukarna, 1990, 63).

Dari sini tampaklah betapa pentingnya arti pemilu bagi bangsa Indonesia yang menganut demokrasi pancasila. Maka tak jarang pemilu tersebut di sebut dengan "pesta demokrasi."

Untuk terselenggaranya pemilu tidak bisa dilepaskan dari peran serta partai politik, sebab partai politik adalah peserta (kontestan) pemilu itu sendiri. Tanpa partai politik, kita tidak bisa mengatakan bahwa pemilu

sebagai wujud demokrasi. Dan dalam negara yang menganut sistim demokrasi, salah satu cara yang ditempuh oleh partai-partai politik adalah dengan ikut serta dalam pemilihan umum. Dengan melalui pemilihan umum partai politik yang berkedudukan sebagai kontestan berusaha bersaing satu sama lainnya untuk mampu memperoleh dukungan yang sebanyak-banyaknya dari rakyat atau warga negara. (Haryanto, 1984, 80).

Salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh peserta pemilu dalam rangka bersaing untuk memperoleh dukungan yang sebanyak mungkin dari rakyat atau warga negara adalah melalui kampanye. Kampanye dilakukan pada tahap sebelum pemungutan suara. (Haryanto, 1980, 108).

Kampanye merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan pada tahap sebelum pemungutan suara, kampanye merupakan suatu unsur yang penting dalam upaya OPP (Organisasi Peserta Pemilu) menarik simpatik rakyat agar menjatuhkan pilihannya pada OPP tertentu dalam pemilu. Untuk menarik calon pemilih inilah digunakan berbagai cara, bentuk, maupun materi kampanye yang bisa memikat orang banyak. (Alfian, 1988, 75).

Adapun yang dimaksudkan dengan kampanye adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para konstestan pemilihan umum (dalam hal ini adalah partai-partai

politik yang turut ambil bagian dalam pemilu), dimana pada gilirannya pendukung ini akan memberikan suaranya kepada partai politik yang menarik tadi. Setiap partai yang terlibat dalam pertarungan untuk memperoleh jumlah suara banyak mungkin dapat dipastikan tidak akan melewatkan kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam kampanye.

Kampanye politik dalam rangka pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para "kontestan" guna menanamkan pengaruh dan simpatik dikalangan masyarakat dengan menjelaskan program-program perjuangannya politik untuk kepentingan bangsa dan negara, sehingga dengan cara demikian masing-masing kontestan berusaha untuk meraih suara sebanyak-banyaknya pada saat pemungutan suara. (Haryanto, 1984, 108).

Adapun fungsi kampanye secara langsung meliputi:

1. Memobilisasikan dukungan warga masyarakat seluas mungkin bagi pihak-pihak yang ikut bertarung untuk memenangkan pemilu atau merebut kekuasaan negara atau pemerintahan.
2. Membedakan pendukung dengan penentang serta mengkristalisasikan isu atau masalah dalam kaitannya dengan kekuasaan negara; dan
3. Mengarahkan atau mengubah sikap warga masyarakat

supaya menjadi positif terhadap partai atau organisasi politik peserta pemilu. (Daniel Dhakidae, 1992, IX).

Kampanye sebagai forum organisasai antara kontestan dengan massa, dapatlah dipandang sebagai hal yang cukup penting dalam kaitannya dengan upaya meraih masa pemilih sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Berbagai cara ditempuh oleh partai-partai politik guna menjelaskan program-program perjuangan politiknya. Cara yang ditempuh oleh parta-partai politik tersebut diusahakan sedemikian rupa sehingga dapat menarik sebanyak mungkin simpati dari para pemilih.

Hal ini bisa kita lihat dalam kampanye 1977, dimana PPP tidak dapat dilepaskan dari kaitannya dengan aspek (Islam). Bahkan ayat suci Al Qur'an digunakan untuk memenangkan partai dan tokoh-tokoh ulama terkenal, selalu dimanfaatkan. Yel-yel serta nyanyian-nyanyian muncul secara kreatif. Adapun yel-yelan serta nyanyian-nyanyian PPP pada umumnya hanya untuk mengingatkan massa pada lambang PPP.

Nilai ulama dan kyai menjadi sangat berarti bagi PPP saat itu, apalagi kalau kyai tersebut tergolong kyai yang kharismatik dan dalam ilmunya. Dalam hal ini PPP cukup mendapat persaingan ketat dari golkar dalam



menghadirkan tokoh-tokoh keagamaan pada kampanye-kampanye mereka.

Cara lain yang ditempuh partai politik guna menarik lebih banyak simpatik para pemilih, yaitu dengan menyelipkan hiburan ditengah rapat raksasa yang diselenggarakannya. Paling tidak hiburan ini berfungsi menarik sebanyak mungkin pengunjung sebelum partai politik yang bersangkutan memaparkan program-programnya dengan mendatangkan artis-artis terkenal.

Selain menyelenggarakan rapat-rapat akbar (raksasa), dalam kampanye partai-partai politik dapat menempuh cara dengan menyelenggarakan pawai keliling kota. Hal ini dapat kita lihat pada PDI yang menampilkan bentuk kampanye "simpatik" dan kampanye "senyum" yang mengajak warga banteng untuk melakukan kerja bakti membagi-bagikan permen dan membantu warga masyarakat yang hendak menyebrang jalan. Selain itu di daerah Istimewa (DI) Yogyakarta PDI menampilkan "Pawai Sri Kandi" yang diikuti oleh wanita-wanita PDI. Dan pawai "Anti Polusi" yang beraneka hiasan (Adriana Elisabeth Sukanto, At.al, 1991, 6).

Demikian pula untuk lebih meningkatkan jumlah pemilih yang menaruh simpati, partai-partai politik tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya yang cukup

besar untuk membuat spanduk-spanduk, gambar-gambar tempel dan lain sebagainya yang kesemuanya itu menggambarkan betapa hebatnya partai politik tersebut. Hal ini terlihat jelas misalnya dalam tubuh PDI, dimana figur Bung Karno juga dimunculkan sebagai simbol. Poster-poster atau gambar Bung Karno sering tampil mewarnai kampanye PDI.

Tampilnya gambar Bung Karno dalam kampanye 1987 ini oleh Prof. Soenario (bekas Menlu dari PNI) di anggap sebagai gejala yang mengingatkan kepada seorang tokoh yang ahli tata negara dengan pendapatnya " Diusungnya gambar Bung Karno oleh massa PDI dalam setiap kampanye merupakan sesuatu yang wajar". Dijelaskan pula bahwa setiap Bangsa dimanapun di dunia akan selalu memuja tokoh-tokoh negara mereka yang kharismatik. (suara merdeka dalam rekaman peristiwa, 1987, 10).

Berdasarkan uraian diatas, maka sudah merupakan suatu hal yang wajar apabila dalam kampanye pemilihan umum selalu terdapat persaingan yang ketat diantara para kontestan (partai politik) untuk memperoleh jumlah suara yang terbanyak pada saat pemungutan suara.

Jadi dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dalam massa kampanye pemilihan umum inilah partai politik selain berusaha sebanyak mungkin, juga sekaligus

berkesempatan untuk melaksanakan salah satu fungsinya yaitu sosialisasi politik dalam hubungannya dengan hal ini dapat di identifikasikan dengan pendidikan politik. Sebagai misal, partai-partai politik dalam kampanye dapat mengajarkan kepada rakyat bagaimana peraturan atau tata tertib yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum, apakah hak dan kewajiban warga negara dalam pemilu dan sebagainya.

Mengenai pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru, pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1971. Ikut serta dalam pemilu 1971 terdiri dari 9 partai yaitu PNI, PSII, NU, FARMUSI, IPKI, PARKINDO, MURBA, PERTI KATOLLIK, dan GOLONGAN KARYA.

Dengan demikian ada 10 peserta dalam pemilu 1971. Berbeda dengan pemilu 1955 yang menggunakan sistem proporsional pemilu 1971 menggunakan sistem tidak langsung. Dengan demikian partai-partai harus merebut perwakilan yang disediakan untuk suatu daerah. Suara yang terkumpul dalam suatu daerah tidak dapat dijumlahkan dengan suara partai yang terkumpul di daerah lain. Dalam pemilu 1971 memperebutkan 360 kursi, sedangkan 100 kursi disediakan untuk ABRI dan non ABRI yang keanggotaannya dilakukan dengan pengangkatan. Jadi seluruh anggota DPR ada 460 anggota. (F.K. Foerwantana.

1994 , 78).

Dalam pemilu 1971 ini, dengan mengejutkan Golkar sebagai pemenang. Sebenarnya Golkar sebagai peserta termuda sudah cukup puas kalau harus menduduki posisi ketiga dibawah partai-partai politik yang lain, namun diluar dugaan Golkar dapat sukses dengan memperoleh suara 62,80 dari seluruh jumlah pemilih.

Dalam pemilu 1971 Golkar untuk DPR mendapat kemenangan mutlak: 236 kursi (masih ditambah 25 berdasarkan pengangkatan), disusul berturut-turut NU (58 kursi), Parmusi (24 kursi), PKRI (3 kursi), dan PERTI (2 kursi), sementara itu partai murba tidak memperoleh kursi. Sedangkan untuk ABRI disediakan 75 kursi yang keanggotaannya dilakukan dengan pengangkatan. Jadi seluruh anggota DPR ada 460 anggota.

Jumlah anggota MPR seluruhnya ada 920 orang, 130 diantaranya merupakan utusan daerah. Dalam MPR Golkar juga menang mutlak .Partai-partai lain kalah bersaing menghadapi Golkar.

Banyak suara terdengar bahwa kebebasan memilih tidak terjamin, tetapi yang mengagumkan dunia adalah pemilu 1971 tidak diramaikan dengan bentrokan dan jatuhnya korban. Ali Moertopo sebagai orang yang berkepentingan dengan golongan karya menilainya dari

sifat pandangan lain, justru dengan pemilu 1971 merupakan pemberian legitimasi kepada Golkar sebagai salah satu eksponen terpenting bahwa seluruh harapannya diutamakan pada Golkar. (M. Rusli Karim, 1993 , 171).

Perolehan kursi yang tidak merata diantara peserta pemilu melahirkan gagasan penyederhanaan partai. DPR hasil pemilu 1971 memiliki 4 fraksi, yaitu 1) Fraksi ABRI, 2) Fraksi karya pembangunan (GOLKAR), 3) Fraksi Persatuan Pembangunan yang terdiri dari NU, FARMUSI, PSII, 4) Fraksi Demokrasi Indonesia yang terdiri dari PNI, PARKINDO, Partai Katolik, IPKI, dalam MPR fraksi demokrasi pembangunan diperkuat dengan anggota MPR dari partai Murba.

Suara yang terdengar dalam masyarakat yang didengar oleh MPR menghendaki jumlah partai diperkecil dan dirombak sehingga partai tidak berorientasi pada politik ideologi, tetapi pada politik pembangunan. Presiden Soeharto juga bersikeras melakukan perombakan tersebut. (P.K. Poerwantana, 1994 , 79).

Khawatir menghadapi perombakan dari atas, pada tahun 1973 partai-partai mengadakan fusi partai yang berideologi Islam (NU, Farmusi, PSII, dan Perti) bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, pada tanggal 5 Januari 1973. Sedangkan partai non Islam (PNI,

Partai Katolik, PARKINDO, IPKI, MURBA) berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 10 Januari 1973. Eksistensi PPP, PDI, GOLKAR ada pada UU no 3 tahun 1975. Dan ketiga kekuatan sospol inilah yang berhak mengikuti pemilu. (dialog, K.H. Syaifuddin Zuhri, At, al, 1984, 4).

Sesuai dengan kehendak rakyat seperti yang tertuang dalam Tap VII/MPR 1973, maka dalam tahun 1977 diselenggarakan kembali pemilihan umum. Pemilu 1977 merupakan pemilu kedua dalam masa Orde Baru. Pemilu 1977 hanya diikuti tiga (3) kontestan yaitu: PPP, PDI, GOLKAR. Dengan demikian maka penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan menjadi lebih sederhana.

Pada pemilu 1977 PPP memperoleh kemenangan sebagai berikut:

PPP mendapat 99 kursi dan Golkar mendapat 232 kursi, sedang PDI mendapat 29 kursi. Dengan demikian PPP memperoleh tambahan 5 kursi bila dibandingkan dengan perolehan kursi 4 partai Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Perti). Dalam pemilu 1971 PPP memperoleh 94 kursi, ini berarti PPP memperoleh kenaikan 2,1% Golkar turun 0,6 persen dan PDI turun 1,41%.

Perbendaharaan istilah politikpun bertambah dengan masuknya "kekuatan sosial politik" dalam tap IV/MPR/1978











Kemenangan yang diraih oleh Golkar yang berturut-turut ini memang tak bisa di pungkiri karena adanya campur tangan ABRI dan dukungan pemerintah dengan segala kekuasaannya. Dukungan dari birokrasi atau pemerintah mengakibatkan dana yang dimiliki oleh Golkar mampu membuat kejutan-kejutan. Sementara partai-partai lain harus puas dengan dana yang pas-pasan.

Disisi lain, adanya kebijaksanaan *Floating Mass* (masa mengambang), seakan-akan semakin memantapkan kedudukan Golkar sebagai pemimpin dalam perolehan suara mayoritas kebijaksanaan *Floating Mass* yaitu para pemilih selalu mengambang, yang hanya diperbolehkan untuk mengekspresikan pilihan politiknya di dalam pemilu yang diselenggarakan sekali dalam lima tahun. Dan diantara dua pemilu yang berjarak lima tahun itu, rakyat harus mengkonsentrasikan pikiran dan tenaganya bukan pada ukuran politik, tetapi pada pembangunan ekonomi. (Afan Gaffar, At, al, xiii).

Adanya ketiga faktor itulah (dukungan pemerintah dan campur tangan ABRI serta adanya kebijaksanaan *floating mass*) yang menjadikan pendukung kemenangan Golkar. Dan dengan adanya dukungan pemerintah dan ABRI inilah, Golkar berhasil memproyeksikan dirinya sebagai partai "Alternatif" yaitu kekuasaan Golkar seolah-olah identik dengan kekuasaan pemerintah yang seluruh



3. Memupuk ukhuwah Islamiyah untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan.
4. Menggairahkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia dalam pembangunan negara dan mengusahakan adanya keseimbangan mental sepritual dan fisik material.
5. Mengadakan kerja sama dengan golongan-golongan sosial politik dan semua golongan lainya untuk mencapai tujuan bersama atas dasar menghargai dan toleransi sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, pancasila dan UUD 1945.
6. Mendorong tercapainya iklim yang sebaik-baiknya bagi terlaksanannya kegiatan peribadatan menurut ahli sunnah waal jamaah.
7. Menegakkan dan mengamankan pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Mengadakan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan partai. (R. Wiyono, SH., 1982, 168).

PPP yang berasaskan pancasila, berketapan hati dan bertekad dengan segenap kemampuannya untuk berusaha mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniyah berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan cita-cita proklamasi tersebut, PPP sebagai salah satu modal dasar pembangunan Bangsa, dalam perjuangannya senantiasa berpegang pada program perjuangan partai sebagai pedoman bagi pimpinan dan kader dalam menampung, mengeluarkan, memperjuangkan dan membe- la aspirasi rakyat dan mewujudkan cita-cita.

Adapun langkah kebijaksanaan dalam rangka memperjuangkan aspirasi umat tersebut telah dilakukan oleh PPP melalui fraksi PPP di MPR dan DPR antara lain dalam bahasan berbagai undang-undang di DPR yang meliputi:

- 1). Rancangan Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional
- 2). Rancangan undang-undang tentang perkawinan
- 3). Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama
- 4). Rancangan tentang perfilman.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat, PPP melalui PPP mengusulkan agar kredit Bank negara lebih banyak di utamakan untuk membantu usaha golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil, sedangkan Bank-Bank swasta melayani ekonomi kuat.

Selain itu PPP juga menolak berbagai bentuk perjudian seperti FORKAS, SDSB, sebab kehadiran SDSB menyebabkan berkembangnya syirik/khurafat yang memba- hayakan aqidah umat, penciptaan generasi hayali dan merangsang terjadinya kriminalitas. PPP melalui PPP

telah mengirim surat kepada Menteri Sosial untuk segera mencabut dan menarik kupon tersebut. Dan usaha ini ternyata berhasil berkat dukungan dari kalangan pemuda atau mahasiswa dan para ulama serta atas kearifan pemerintah. (Moch. Lukman Fatahullah Rais, . 1994, 201).

Sedangkan usaha lain yang dilakukan oleh PPP melalui FPP yang menjadi prioritas penanganannya, ialah masalah pembangunan yang meliputi:

1. Masalah pertanian.
2. Masalah peremajaan kota.
3. Masalah tenaga kerja.
4. Masalah terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.
5. Masalah generasi muda dan masa depan.
6. Masalah moral bangsa (korupsi dan perjudian dalam segala bentuknya, baik yang terselubung maupun yang terang-terangan). (Bashari Muchsin, 1994, 64).

Adapun kendala yang dihadapi PPP, ini bermula dari tiga ide pembaharuan yang dibawa oleh ketentuan perundangan (yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas, terlepasnya ormas dari struktur organisasi orpol dan ormas terbuka). Masalah yang dihadapi PPP terutama terletak pada dua topik terakhir. Penerimaan PPP terhadap Pancasila sebagai satu-satunya asas telah tuntas dengan dicantumkannya hal tersebut dalam anggaran

dasar orpol bersangkutan, pencantuman menurut adanya sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan jiwa Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Secara struktural memang tidak terdapat adanya ormas dalam organisasi PPP. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, keanggotaan PPP adalah bersifat perorangan dengan sistem aktif. Fusi 1973 membantu memperlancar penghapusan *Onderbouw* dalam tubuh PPP, sehingga semua ormas yang pernah berafiliasi dengan unsur-unsur PPP di masa lalu telah memisahkan diri sebagai ormas yang independen dan mandiri.

Masalah partai terbuka belum terpecahkan oleh PPP, baik AD/ART maupun khittah perjuangan PPP dengan jalan menggambarkan bahwa PPP adalah partai Islam. Pasal lima ayat 3 AD/ART PPP, yaitu "memupuk ukhuwah Islamiyah untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan". (Alfian, 1988, 49).

Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa PPP adalah penyalur aspirasi politik umat Islam. Akibat yang ditimbulkan dalam hal ini adalah bahwa orang yang tidak tergerak atau tertarik untuk menjadi anggota PPP. Memang benar bahwa persyaratan keanggotaan PPP tidak tercantum ketentuan harus beragama Islam, namun dari tujuan, usaha dan hakikat perjuangan PPP di atas terlibat adanya









tidak menghadapi masalah di bidang Pancasila sebagai satu-satunya asas karena pemerintahlah yang pertama kali menganggap perlu hal tersebut. Dalam hal orpol terbuka, Golkar tidak menghadapi masalah karena Golkar memang sudah semenjak semula, merupakan orpol terbuka. Siapa saja yang berminat dan memenuhi persyaratan dapat menjadi anggota orpol ini tanpa dibatasi oleh berbagai hal, seperti keagamaan, ras, pendidikan dan lain-lainnya.

Disisi lain Golkar tidak mengalami proses pemisahan ormas dari orpol seperti yang dialami kedua orpol lainnya dengan adanya fusi 1973. Akibatnya adalah bahwa tradisi lama mengenai ormas sebagai onderbouw masih tetap kuat dalam ormas yang bergabung pada Golkar. Akhirnya pada tahun 1985 ormas-ormas itu dikeluarkan. Masalah ini semakin rumit karena besarnya ormas yang bergabung dalam Golkar dan sebagian dari ormas tersebut adalah tidak mandiri. (Alfian dan Nazaruddin Syamsuddin, 1988 ; 50).

Pembaharuan dalam gabungan orpol-ormas mengharuskan Golkar untuk mengadakan perubahan dalam melihat peranan dan fungsi ormas-ormas yang bergabung dalam Golkar. Ketentuan baru menuntut agar ormas-ormas yang ada tidak lagi berada dalam organisasi Golkar, tidak lagi milik, Golkar, dan tidak lagi milik Golkar. kalau sebelum 1985



Demokrasi Indonesia terdapat dalam pokok-pokok usahanya, yaitu:

- (1) Mendidik, mencerdaskan dan menyadarkan rakyat sehingga menjadi insan pancasilais sejati.
- (2) Mempersiapkan konsepsi-konsepsi yang bernilai dalam segala bidang kegiatan kemasyarakatan, bangsa dan negara, dalam dan luar negeri.
- (3) Memperjuangkan terlaksananya konsepsi-konsepsi tersebut di atas serta berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam melaksanakan pembangunan Demokratis, seimbang dan progresif. (R. Wiyono, 1982 ; 205).

Adapun kendala yang dihadapi oleh PDI adalah mirip dengan kasus Golkar karena PDI tidak menghadapi masalah dalam hal Pancasila sebagai satu-satunya asas dan orpol terbuka. Dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi PDI, ormas ini tidak lagi berhak menggunakan asas atau ideologi lain. Dasar kegiatan orpol ini adalah Pancasila, dan ini harus ditunjukkan dalam kegiatan politik sehari-hari. Sedangkan prinsip orpol terbuka telah dipergunakan oleh orpol ini semenjak fusi 1973 sehingga keanggotaan PDI tidak dibatasi oleh perbedaan agama, suku, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya.

Sebelum fusi, dua dari unsur PDI (yaitu Partai

Katolik dan Parkindo) memang mambatasi keanggotaan orpol mereka berdasarkan agama, yaitu Katolik untuk yang pertama dan protestan untuk yang kedua. Sedangkan tiga bekas partai politik yang lainnya yang berfusi kedalam PDI (FNI, IPKI, dan MURBA) memang sudah merupakan partai terbuka semenjak semula. Dengan meleburnya partai katolik dan Parkindo kedalam PDI maka eksistensi kedua bekas partai politik itu menghilang sehingga hilang pula ciri-ciri ketertutupan PDI.

Diatas telah disinggung bahwa fusi 1973 melepaskan PDI dari ormas-ormas kelima unsur yang telah bergabung kedalam PDI. seperti halnya kasus PPP, ormas-ormas tersebut tidak menganggap diri mereka ikut berfusi kedalam PDI. Oleh karena itu ormas-ormas tersebut menjadi ormas bebas setelah fusi 1973 sehingga tidak ada lagi hubungan organisatoris (Terutama dalam Pembaharuan orpol-ormas) di bandingkan dengan Golkar.

Dari fihak orpol sendiri juga masih terlihat adanya pengaruh dari pola hubungan orpol-ormas yang lama. Ketua PDI umpamanya, Pernah mengajukan pandangan bahwa GMNI adalah sumber kader PDI. Hal ini dibantah oleh ketua umum GMNI dengan mengatakan bahwa GMNI adalah organisasi independen yang tidak terikat dengan salah satu organisasi tertentu. Sesuai dengan pandangan baru pada masa pasca 1985. GMNI sebagai sebuah ormas tidak

mempersiapkan kader untuk orpol tertentu karena pilihan terhadap organisasi politik adalah pilihan anggota ormas secara individual yang tidak perlu dicampuri oleh ormas bersangkutan. (Alfian dan Nazaruddin Syamsuddin, 1988 ; 52).

### C. FUNGSI ORSOSPOL (PPP, GOLKAR, PDI) PADA MASA ORDE BARU.

Partai politik merupakan pusat kegiatan bagi rakyat untuk berpolitik. Oleh karena itu diperlukan suatu organisasi yang betul-betul mantap dan memberikan rasa aman bagi rakyat tersebut di dalam menyalurkan aspirasinya tersebut. Dan karena rakyat dalam suatu negara jumlahnya banyak, maka secara otomatis pula diperlukan adanya partai politik yang lebih dari satu partai. Hal itu bertujuan agar rakyat dapat memilih suatu partai di dalam menyalurkan aspirasinya sesuai dengan yang dikehendakinya dan sesuai dengan hati nuraninya. Didalam melakukan segala macam kegiatannya partai politik melaksanakan beberapa fungsi. Pada umumnya fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh partai politik di negara yang satu sama dengan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh partai politik di negara-negara lain. Memang tidak dapat disangkal terdapat suatu kemungkinan bahwa di suatu negara salah satu fungsi partai politik dilaksanakan dengan lebih menonjol, akan



tetapi di negara yang lainnya fungsi yang sama tersebut dilaksanakan dengan tidak begitu menonjol atau bahkan tidak pernah dilaksanakan sama sekali.

Pada umumnya dapat dinyatakan bahwa partai politik yang terdapat di beberapa negara melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik.
2. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.
3. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik.
4. Partai politik sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan.
5. Partai politik sebagai sarana partisipasi politik.
6. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik.
7. Partai politik sebagai sarana pembuat kebijaksanaan.
8. Partai politik sebagai sarana untuk mengkritik rejim yang berkuasa. (Haryanto, 1984 : 14).

Dalam negara yang Demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi:

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi yaitu menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran dalam masyarakat berkurang. (c.s.t. Kansil S.H. 1979 , 19).

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana komunikasi partai politik ini, bertindak sebagai

penghubung antara 2 pihak, partai politik menyalurkan informasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lain secara timbal balik. Pada umumnya arus informasi di suatu negara bersifat 2 arah, artinya informasi tersebut berjalan dari atas kebawah dan dari bawah keatas. Kedudukan partai dalam arus ini adalah sebagai jembatan antara mereka yang memerintah dengan mereka yang diperintah.

Dari atas partai menyampaikan pesan dari pemerintah berupa kebijakan-kebijakan umum yang dikeluarkan pemerintah pada anggota-anggota partai. Dari bawah partai menyampaikan tuntutan dari anggota-anggotanya dan masyarakat pada umumnya pada pemerintah dan pusat pengambilan keputusan. (Umaidi Radi, MA. 1984 , 31).

Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa partai politik dapat bertindak sebagai penghubung yang menampung arus informasi, baik informasi yang berasal dari pihak pemerintah/penguasa untuk disalurkan kepada pihak yang diperintah atau masyarakat. Maupun informasi yang berasal dari pihak yang diperintah atau masyarakat untuk disalurkan kepada pihak yang memerintah atau penguasa.

Dalam proses yang demikianlah partai politik sebagai komunikasi berperan sebagai penghubung, yaitu menyalurkan informasi yang datangnya dari masyarakat

untuk kemudian disalurkan pada masyarakat:

2. Partai politik sebagai sarana sosial politik yaitu suatu cara dimana masyarakat meneruskan kebudayaan politik dari suatu generasi kegenerasi berikutnya. Untuk menstransmisikan atau meneruskan kebudayaan politik tersebut diperluas sarana sosialisasi politik. Dan salah satu sarana sosialisasi politik adalah melalui partai politik. Sebab dengan melalui partai politik. Sebab dengan melalui partai politik dapat terjadi kontak politik langsung dari pada warga negara.

Dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai sosialisasi politik, maka partai politik berkewajiban untuk mengajarkan idiologi partai kepada para anggotanya atau para pendukungnya. Disamping itu partai politik berkewajiban untuk mengajarkan kepada para anggotanya agar supaya mereka mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara, sehingga mereka mengetahui akan hak dan kewajibannya menjadi warga negara Indonesia yang baik. (Haryanto , 15).

Untuk menyampaikan norma-norma politik dan penyampaian idiologi partai kepada para anggotanya dan kepada masyarakat pada umumnya, maka partai politik menggunakan berbagai cara misalnya melalui ceramah-ceramah, kursus-kursus maupun penataran politik.

3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu mencari dan mengajak orang berbakat untuk ikut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai dengan cara melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain.

Palaksanaan fungsi ini dinyatakan dalam bentuk usaha dari partai politik untuk mengambil atau menarik orang-orang yang berbakat dalam politik untuk menjadi kader politik, usaha rekrutmen ini biasanya berkaitan erat dengan sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik. Disamping itu juga berhubungan erat dengan mambangkitkan partisipasi politik masyarakat.

Tenaga-tenaga berbakat yang diambil dan diajak untuk menjadi kader politik kemudian dibina menjadi generasi penerus nilai-nilai politik. Dengan demikian terjadi peralihan nilai-nilai dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hal ini terbukti dalam kehidupan negara kita dengan adanya usaha untuk mewariskan nilai-nilai dari generasi terdahulu kepada generasi muda melalui rekrutmen dan pembinaan generasi muda.

4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik yaitu berusaha mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat, misalnya informasi yang dapat menimbulkan kegelisahan dan perpecahan dalam masyarakat.

Perbedaan pendapat dan persaingan sudah merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi di negara-negara yang menganut paham demokrasi. Hal ini disebabkan oleh karena di negara-negara tersebut, kebebasan bagi para warga negara untuk saling bersaing dan mengemukakan pendapat pendapatnya dijamin atau diperbolehkan.

Apabila di dalam suatu masyarakat atau negara terjadi konflik diantara warga negara atau golongan-golongan yang ada maka partai politik dapat berperan sebagai sarana untuk dapat menyelesaikan konflik atau perselisihan tersebut. (Haryanto, 1984 , 34).

Di Indonesia sendiri yang juga menganut sistim demokrasi Pancasila, partai politik dan Golkar mempunyai beberapa fungsi.

Adapun mengenai fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam UU No.3 tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar sebagai berikut: a) Sebagai salah satu lembaga Demokrasi Pancasila menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat secara sehat dan mewujudkan hak-hak politik rakyat. b) Membina anggota-anggotanya menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila, serta terhadap UUD 1945 dan sebagai salah satu wadah untuk mendidik kesadaran politik rakyat. Untuk lebih jelasnya marilah kita lihat fungsi-fungsi dari masing-masing partai sebagai berikut:



Komunikasi timbal balik tersebut bisa juga dalam arti mengkomunikasikan aspirasi rakyat kepada pemerintah dan menyampaikan pesan-pesan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. (Bashori Muchsin, 1994 , 62).

## 2. GOLKAR DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA

Golkar sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang berorientasi pada karya dan kekaryaannya mempunyai fungsi :

- a). Sebagai wadah berhimpunnya anggota masyarakat yang memiliki persamaan kehendak sesuai dengan jenis kerja/profesi dan lingkungan kerja/ fungsi untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b). Mengemban mengamalkan dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan tanpa membedakan latar belakang suku, keturunan, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta golongan-golongan.
- c). Menampung, memadukan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan keadaan politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berne

